

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan dalam menjalankan bisnis tentu tidak terlepas dari adanya suatu risiko yang menjadi perhatian stakeholders untuk menghindari terjadinya kecurangan akuntansi. Risiko sebagai ketidakpastian yang terkait dengan potensi kerugian atau keuntungan. Menurut Kieso dan Weygandt dalam (Aljifri & Hussainey, 2007) informasi risiko dapat membantu investor dalam proses pembuatan keputusan investasi yang rasional. Mazaya & Fuad (2018) menyatakan bahwa perusahaan didorong tidak hanya untuk melaporkan kegiatan mereka tetapi juga untuk melaporkan tingkat risiko perusahaan dan seberapa baik mereka mampu mengelola risiko. Pengungkapan risiko atau *risk disclosure* dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan perusahaan karena pengungkapan semacam ini membantu meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan mengurangi biaya modal. Menurut Miihkinen, A (2013) pengungkapan risiko juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam penerapan manajemen risiko karena membantu pengguna laporan keuangan untuk menilai risiko saat ini dan masa depan. Pengungkapan risiko juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kegunaan pelaporan keuangan.

Seperti di Indonesia masih saja terdapat perusahaan yang kurang mengantisipasi risiko yang ada. Kasus PT Jamu Cap Nyonya Meneer, yang telah gulung tikar akibat keadaan tidak sehatnya segi finansial yang membuatnya mempunyai utang mencapai 89 milyar kepada sekitar 35 kreditur yang tidak mampu dilunasi. Selain itu tidak tertanganinya risiko strategis dan operasional yang cukup panjang dan timbul permasalahan karena banyaknya unsur keluarga dalam perusahaan menyebabkan ketidaktegasan pembagian peran dan tanggung jawab, maupun permasalahan operasional yang muncul terus menerus dan kasus PT Tiga Pilar Sejahtera yang terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen lama, diketahui terdapat *overstatement* sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap dan sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA Entitas Food. Terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema Grup AISIA kepada

pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman AISA dari beberapa bank dan pencairan deposito berjangka. Tidak ditemukan pengungkapan secara memadai kepada para pemangku kepentingan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa masih rendahnya transparansi pelaporan informasi mengenai laporan keuangan di dalam suatu perusahaan yang meliputi informasi mengenai pengungkapan risiko dan tidak memiliki *corporate governance* yang baik. Laporan keuangan hanya disusun agar sesuai dengan standar akuntansi dan tidak benar-benar mencerminkan keadaan dan realitas perusahaan secara keseluruhan.

Peraturan yang mengatur tentang pengungkapan risiko di Indonesia yang mensyaratkan adanya informasi terkait risiko yang dilaporkan perusahaan dalam *annual report*. Seperti yang tertuang dalam PSAK No. 60 (Revisi 2014) tentang Instrumen Keuangan: mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan dimaksud agar pengguna mampu mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas, risiko-risiko yang timbul, sejauh mana entitas terpapar risiko yang berasal dari instrumen keuangan dan cara entitas mengelola risiko tersebut. Peraturan lain yang mengatur tentang pengungkapan risiko yaitu keputusan ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik, bahwa perusahaan diharuskan menyajikan penjelasan tentang risiko-risiko yang bisa mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut.

Karakteristik perusahaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan luas pengungkapan berbeda di setiap perusahaan. Menurut Shagan (2022) bahwa terdapatnya suatu perbedaan karakteristik dipercaya berpengaruh terhadap besarnya pengungkapan risiko perusahaan, karena karakteristik perusahaan juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan baik segi finansial maupun non finansial. Masing-masing perusahaan mempunyai kemampuan finansial yang berbeda, hambatan yang dihadapi berbeda dan cara manajemen risiko yang diambil juga berbeda yang membuat perusahaan memiliki preferensi masing-masing tentang luas pengungkapan risiko yang akan mereka sajikan dalam laporan keuangan. Beberapa model penelitian yang berkaitan dengan karakteristik perusahaan yang di gunakan untuk pengungkapan risiko. Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari beberapa faktor seperti umur perusahaan, dan *leverage*.

Pengungkapan informasi perusahaan bervariasi dari waktu ke waktu (Talpur Lizam., Mohd, 2018). Umur perusahaan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko karena usia dianggap sebagai tahap pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Perusahaan yang lebih lama berdiri umumnya akan menjadi perusahaan yang lebih besar sehingga mereka lebih bersedia untuk memberikan informasi pengungkapan risiko untuk meyakinkan pihak luar perusahaan. Beberapa model penelitian yang berkaitan dengan umur perusahaan. Hasil penelitian Abdallah et al (2021); Shivaani, M., Jain, P.K. & Yadav, (2019); Rujiin dan Sukirman (2020) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan. Berbeda dari hasil penelitian Amrin, Arfan (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa umur perusahaan memiliki dampak negatif pada praktik pengungkapan risiko.

Kreditur dari perusahaan dengan *leverage* tinggi memiliki insentif yang kuat untuk mendorong manajemen mengungkapkan lebih banyak informasi (Amran et al, 2009). Perusahaan dengan *leverage* tinggi mungkin memiliki lebih banyak insentif untuk mengungkapkan risiko mereka untuk menunjukkan sinyal yang baik untuk menyelesaikan hutang mereka. Ketika tingkat kewajiban tinggi, kreditur akan mendesak perusahaan untuk pengungkapan risiko. Sesuai dengan hasil penelitian Khelif & Hussainey (2014), Rahma & Almilia (2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *risk disclosure*. Berbeda dari hasil penelitian Aryani, Dwi., dan Hussainey (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki efek negatif pada pengungkapan risiko.

Menurut Susilo (2017:168) untuk mengurangi adanya kasus risiko maka diperlukannya suatu sistem yang dapat mengendalikan dan mengarahkan suatu perusahaan seperti *corporate governance*. Penerapan *Corporate Governance* dalam perusahaan *go public* berperan penting bagi perusahaan yang mengedepankan keberlanjutan usaha untuk meningkatkan kinerja dan citra perusahaan (Tarantika dan Solikhah, 2019). Namun, berdasarkan data *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) Indonesia berada di urutan paling terakhir dengan selisih skor yang tipis. Dari data di bawah menunjukkan Indonesia memiliki *corporate governance* yang buruk di banding Negara-negara ASEAN yang lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Hal ini berarti, meskipun perusahaan di Indonesia sudah menerapkan tata kelola

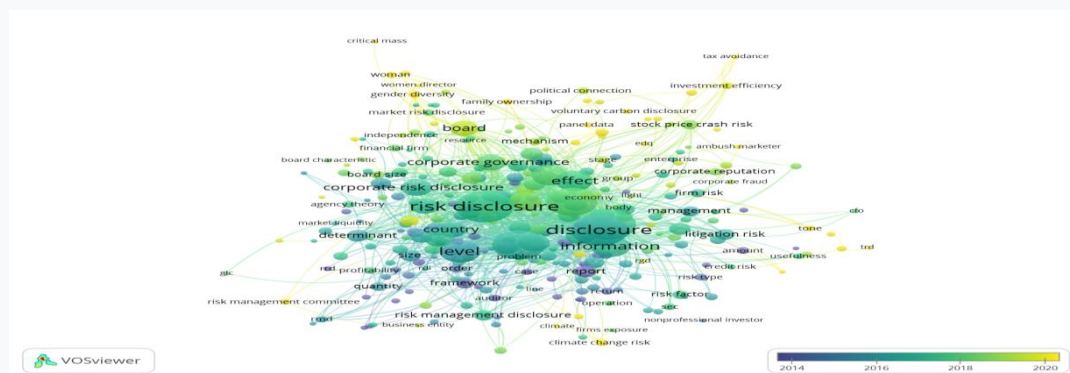
yang baik (*good corporate governance*) di setiap perusahaan namun dalam pelaksanaannya belum maksimal.

CG Watch 2020 market rankings and scores		
Market	Total (%)	Macro market highlights
1. Australia	74.7	Banking commission spurs enforcement, still no federal ICAC
=2. Hong Kong	63.5	New audit regulator, enforcement remains strong, ICAC disappoints
3. Singapore	63.2	Enforcement firming, rules improve, company disclosure disappoints
4. Taiwan	62.2	Big CG reform push on multiple fronts, rules still complicated
=5. Malaysia	59.5	Political turmoil erodes government scores, other areas hold steady
=5. Japan	59.3	Ahead on climate change reporting, behind on company CG disclosure
7. India	58.2	New audit regulator, civil society surges, public governance disappoints
8. Thailand	56.6	Political turmoil erodes government scores, rules strong, investors improve
9. Korea	52.9	Public governance strengthens, CG disclosure improves, regulatory opacity
10. China	43.0	Forging its own governance path, still waiting for ESG reporting guidelines
11. Philippines	39.0	Stronger regulatory focus on CG, investors and civil society disappoint
12. Indonesia	33.6	CG reform continues to struggle, some stronger rules, new e-voting system

Source: ACGA

Gambar 1.1 data *Asian Corporate Governance Association (ACGA)* di Indonesia

Menurut Abraham dan Cox (2007) pengungkapan risiko dapat dipengaruhi oleh struktur tata kelola. Terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik akan mendorong pengungkapan risiko perusahaan yang tinggi (Fitania & Firmansyah, 2020). Menurut Kabir et al (2019) asimetri informasi dapat dikurangi dengan memastikan tata kelola perusahaan yang lebih baik yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengungkapan risiko perusahaan secara positif. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian tentang dampak mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan risiko perlu diperdalam Al-Maghzom et al (2016). Mekanisme tata kelola yang baik, menanggapi rezim demokratis, yang dicirikan oleh akuntabilitas dan tanggung jawab yang jelas, untuk memastikan transparansi yang memuaskan dan mengembalikan kepercayaan investor. Menurut Monks & Minow (2011) menyatakan bahwa *corporate governance* menggambarkan hubungan pihak-pihak perusahaan untuk menjalankan tugas dalam menentukan arah dan kinerja.



Gambar 1.2 Visualisasi area topik menggunakan VOSviewer menggunakan visualisasi overlay

Warna terang yang menyiratkan arah fokus baru peneliti dalam penelitian *board* yang termasuk *gender diversity*, *family ownership* yang terjadi di sekitar tahun 2020 dan masih jarang atau belum banyak diteliti. Bagian dari *corporate governance* yang menjadi fokus penelitian adalah pertama, proporsi dewan komisaris independen yaitu sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Menurut Mubarak & Rohman (2013) keberadaan komisaris independen sebagai bagian pelaksanaan *good corporate governance* mungkin dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko perusahaan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mokhtar dan Mellett (2013) dan Oliveira, et al (2011) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen signifikan dan dampak positif terhadap pengungkapan risiko. Sedangkan hasil penelitian Rifani dan Astuti (2019) proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

Kedua, aspek lebih lanjut terkait dengan dewan direksi adalah keragaman gender dewan. Menurut Halder, et al (2020) keragaman dewan mengacu pada berbagai fitur seperti jenis kelamin, usia, kebangsaan, pengalaman profesional, dan pendidikan anggota dewan. Menurut Mishra dan Jhunjhunwala dalam Bufarwa et al (2020) pengungkapan sebagian besar dipandang sebagai tugas manajerial tetapi adanya opini yang beragam diharapkan dapat memberikan tekanan yang cukup pada manajemen untuk terlibat dalam pengungkapan yang lebih banyak. Direksi wanita dapat meningkatkan pengambilan keputusan dengan memberikan perspektif dan pendapat yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan (Salem et al., 2019). Di antara fitur-fitur lainnya, *gender* saat ini merupakan topik keragaman yang paling diperdebatkan dalam literatur akademik. Mempertimbangkan bahwa *gender* dapat menjelaskan perbedaan dalam perilaku dan keterampilan, literatur terbaru tentang keragaman *gender* memberikan hasil yang luas. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kehadiran perempuan di dewan direksi mempengaruhi keputusan dewan secara positif (Salem et al., 2019) dan Seebeck & Vetter (2021) sedangkan hasil penelitian berbeda dalam konteks pengungkapan risiko perusahaan Allini, et al (2014) memberikan bukti yang mendukung hubungan negatif antara keragaman *gender* dewan dan tingkat pengungkapan risiko nonfinansial.

Ketiga, kepemilikan keluarga. Perusahaan milik keluarga dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang dikendalikan dan dikelola oleh keluarga. Keluarga pendiri dan anggota keluarga sering kali ditunjuk sebagai individu kunci dan dewan direksi (Ismail, et al 2014); Lotfi, S. & Mohammadi (2014). Misalnya, pemegang saham utama bank yaitu keluarga maka dapat menekan manajer untuk mengungkapkan informasi yang lebih transparan terkait dengan risiko untuk mengamankan akses ke sumber daya penting, seperti dana dan pelanggan (Branco, M. C., & Rodrigues, 2008). Menurut Wang (2006) keluarga berkeinginan untuk meneruskan usahanya untuk generasi berikutnya. Dalam rangka menjaga reputasi perusahaan, manajemen dituntut untuk memberikan informasi yang transparan dan berkualitas. Beberapa penelitian (Block, J & Wagner, 2014); Habbash, M (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga lebih mungkin memainkan peran tanggung jawab sosial yang positif yang dapat direfleksikan secara positif pada pengungkapan CSR. Menurut Cascino, et al (2010); Elamer et al (2019) menemukan hubungan positif antara kepemilikan saham keluarga dan kualitas pengungkapan. Sedangkan hasil penelitian Habtoor., Hassan & Aljaaidi (2019) kepemilikan keluarga memiliki hubungan negatif dengan *corporate risk disclosure*.

Keempat, kualitas auditor eksternal. Auditor eksternal yang digunakan oleh perusahaan akan mempengaruhi kepercayaan pemegang saham (Mokhtar dan Mellett, 2013). Demi reputasi, auditor cenderung menuntut pengungkapan risiko yang lebih tinggi pada perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh auditor independen yang bereputasi juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan investor (Elshandidy & Neri, 2015). Berdasarkan hasil penelitian (Amrin, 2019) dan (Mazaya & fuad, 2018) menunjukkan bahwa kualitas auditor eksternal merupakan faktor utama yang menentukan sejauh mana pengungkapan risiko. Sedangkan hasil penelitian (Sulistyaningsih & Gunawan, 2016) menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko perusahaan.

Pentingnya pengungkapan risiko dalam pelaporan keuangan, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, pengungkapan risiko masih merupakan bidang yang kurang diteliti meskipun permintaan yang tinggi dari investor dan pemegang saham untuk pengungkapan manajemen risiko. Peneliti sebelumnya telah meneliti hubungan

antara karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan risiko. Namun, hasil penelitiannya masih beragam (tidak konsisten). Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian “Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* dan *Risk Disclosure*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *risk disclosure*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *risk disclosure*?
3. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *risk disclosure*?
4. Apakah keragaman *gender* dewan berpengaruh terhadap *risk disclosure*?
5. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap *risk disclosure*?
6. Apakah kualitas auditor eksternal berpengaruh terhadap *risk disclosure*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *risk disclosure*
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *risk disclosure*
3. Untuk mengetahui apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *risk disclosure*
4. Untuk mengetahui apakah keragaman *gender* dewan berpengaruh terhadap *risk disclosure*
5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap *risk disclosure*
6. Untuk mengetahui apakah kualitas auditor eksternal berpengaruh terhadap *risk disclosure*

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi *stakeholders*

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pengungkapan risiko pada laporan tahunan perusahaan sehingga dapat mengetahui seberapa besar tingkat risiko yang mereka hadapi dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum pengambilan keputusan untuk menginvestasi modalnya dan mendapatkan hasil yang sesuai harapan.

2. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai karakteristik perusahaan, *corporate governance* dan *risk disclosure* atau

pengungkapan risiko dan bisa dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.